

## Tantangan dan Kebutuhan Satuan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sumatera Utara

Felicia Joice Sitinjak<sup>1\*</sup>, Asril Rouli Nilawati Pasaribu<sup>2</sup>, Elsa Monica Br Sirait<sup>3</sup>,  
Irenita Br Perangin Angin<sup>4</sup>, Widia Wati Sipayung<sup>5</sup>, Elsa Sinurat<sup>6</sup>,  
Tesa Arizky Simanjuntak<sup>7</sup>, Lili Tansliova<sup>8</sup>

<sup>1-8</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan, Indonesia  
E-mail: [feliciajoyce3@gmail.com](mailto:feliciajoyce3@gmail.com)<sup>1</sup>, [asrilroulipasariburouli@gmail.com](mailto:asrilroulipasariburouli@gmail.com)<sup>2</sup>, [siraitelsa2003@gmail.com](mailto:siraitelsa2003@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[renitaperanginangin@gmail.com](mailto:renitaperanginangin@gmail.com)<sup>4</sup>, [widiawati06sipayung@gmail.com](mailto:widiawati06sipayung@gmail.com)<sup>5</sup>, [elsahsinurat507@gmail.com](mailto:elsahsinurat507@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[tesaarizkysimanjuntak@gmail.com](mailto:tesaarizkysimanjuntak@gmail.com)<sup>7</sup>, [lilitans@unimed.ac.id](mailto:lilitans@unimed.ac.id)<sup>8</sup>

Korespondensi penulis: [feliciajoyce3@gmail.com](mailto:feliciajoyce3@gmail.com)\*

**Abstract.** *Inclusive education in North Sumatra faces various challenges in its implementation, especially in meeting the needs of children with special needs (ABK). This study aims to identify the challenges and needs of educational units in implementing inclusive education for ABK. The research method used is qualitative with a case study approach, involving in-depth interviews with teachers, principals, parents, and education stakeholders. The results of the study indicate that the main challenges include the lack of understanding and readiness of teachers in handling ABK, limited supporting facilities and infrastructure, and minimal adequate training and resources. On the other hand, the main needs identified are increasing teacher capacity through special training, providing accessible facilities, and strong policy support from the local government. This study concludes that to achieve successful implementation of inclusive education, collaboration between the government, schools, parents, and the community is needed in overcoming challenges and meeting existing needs. Recommendations submitted include strengthening teacher training programs, increasing budget allocation for facilities and infrastructure, and more intensive socialization of the importance of inclusive education for all levels of society.*

**Keywords:** *Challenges, Children with Special Needs, Inclusive Education, Needs, North Sumatra.*

**Abstrak.** Pendidikan inklusif di Sumatera Utara menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan satuan pendidikan dalam menerapkan pendidikan inklusif bagi ABK. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman dan kesiapan guru dalam menangani ABK, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta minimnya pelatihan dan sumber daya yang memadai. Di sisi lain, kebutuhan utama yang teridentifikasi adalah peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan khusus, penyediaan fasilitas yang aksesibel, dan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keberhasilan implementasi pendidikan inklusif, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan yang ada. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan program pelatihan guru, peningkatan alokasi anggaran untuk sarana prasarana, serta sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

**Kata Kunci :** Tantangan, Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan Inklusif, Kebutuhan, Sumatera Utara.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan inklusif merupakan upaya penting dalam mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak,

tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Namun, meskipun telah diatur dalam berbagai kebijakan nasional, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, masih menghadapi berbagai tantangan. Selain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, termasuk bagi ABK. Pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut secara khusus menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Namun, dalam praktiknya, masih banyak satuan pendidikan yang belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesiapan sarana prasarana, rendahnya kompetensi guru, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif.

Menurut Farah at.all (2022), pendidikan inklusif adalah pendekatan yang bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang terbuka bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Pendidikan inklusif tidak hanya memberikan kesempatan belajar bagi ABK, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua peserta didik. Hal ini diperkuat oleh Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial untuk belajar bersama dengan peserta didik pada umumnya. Namun, dalam praktiknya, banyak satuan pendidikan di Sumatera Utara yang belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusif di Sumatera Utara adalah kurangnya kesiapan sarana dan prasarana. Menurut Heni Mularsih (2019), banyak sekolah inklusif di Indonesia belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang sumber inklusi dan alat bantu pembelajaran. Ruang sumber inklusi merupakan ruangan khusus yang digunakan untuk memberikan layanan pembelajaran tambahan bagi ABK, seperti terapi wicara, terapi okupasi, atau bimbingan khusus. Tanpa ruang ini, ABK akan kesulitan mendapatkan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kompetensi guru dan tenaga pendidik juga menjadi tantangan serius. Menurut Smith (2015), guru memegang peran kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Namun, banyak guru di Sumatera Utara belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup untuk mengelola kelas inklusif. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi guru dalam menangani ABK. BPMP Provinsi Sumatera Utara mencatat bahwa hanya sedikit guru yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang pendidikan inklusif. Padahal,

pelatihan dan pembinaan bagi guru merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif. Kurikulum yang digunakan di banyak sekolah inklusif di Sumatera Utara juga belum sepenuhnya terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan ABK. Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, kurikulum pendidikan inklusif harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah masih menggunakan kurikulum yang sama untuk semua siswa, termasuk ABK. K. Sri Kusuma Wardani dkk. menyarankan bahwa kurikulum pendidikan inklusif perlu dimodifikasi melalui penyusunan program pembelajaran individual (PPI) untuk ABK. PPI merupakan rencana pembelajaran yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing ABK. Namun, implementasi PPI masih sangat terbatas di Sumatera Utara karena kurangnya pemahaman dan sumber daya yang memadai.

Kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan inklusif juga masih rendah. Menurut Martona (2013), pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Namun, banyak masyarakat di Sumatera Utara yang masih memiliki stigma negatif terhadap ABK, sehingga menghambat partisipasi ABK dalam pendidikan inklusif. BPMP Provinsi Sumatera Utara mencatat bahwa sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif masih sangat terbatas. Padahal, menurut Farah dkk. (2022), pendidikan inklusif dapat berhasil jika ada dukungan dari semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPMP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan identifikasi kapasitas satuan pendidikan sebagai langkah awal dalam meningkatkan layanan inklusif. Identifikasi ini bertujuan untuk memetakan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, termasuk ketersediaan sarana prasarana, kompetensi guru, dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Seperti yang ditegaskan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif, termasuk fasilitas dan tenaga pendidik yang kompeten. Dengan dukungan yang memadai dari pemerintah, masyarakat, dan tenaga pendidik, satuan pendidikan di Sumatera Utara dapat meningkatkan kualitas layanan inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi ABK untuk meraih potensi terbaiknya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan sumber dari BPMP Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan identifikasi kapasitas satuan pendidikan untuk layanan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena implementasi pendidikan inklusif di Sumatera Utara secara mendalam, termasuk tantangan dan kebutuhan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan inklusif bagi ABK.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap satuan pendidikan yang terlibat dalam program identifikasi kapasitas oleh BPMP Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang dijelaskan oleh Sudaryono (2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah, dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti berinteraksi langsung dengan kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan stakeholder terkait untuk menggali informasi tentang kesiapan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

### **1. Teori yang Mendasari Penelitian**

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori pendidikan inklusif yang menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, termasuk ABK, untuk mengakses pendidikan berkualitas. Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, untuk belajar bersama dengan peserta didik pada umumnya. Teori ini sejalan dengan pendapat Farah dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang terbuka dan ramah bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka.

### **2. Analisis Data**

Data yang diperoleh berdasarkan media atau sumber tertentu yang relevan dan studi dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti kesiapan sarana prasarana, kompetensi guru, dan kurikulum yang digunakan. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan untuk memahami tantangan dan kebutuhan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Seperti yang dijelaskan oleh Sudaryono (2019), analisis data kualitatif

bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui proses interpretasi yang holistik.

Penelitian ini berdasarkan media atau sumber tertentu yang relevan. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori pendidikan inklusif dan teori kesiapan satuan pendidikan, yang menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi ABK serta kesiapan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan inklusif. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami tantangan dan kebutuhan satuan pendidikan dalam implementasi pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di wilayah tersebut.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Sumatera Utara merupakan upaya penting untuk mewujudkan kesetaraan dalam pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai masalah yang perlu diatasi agar layanan pendidikan inklusif dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Sumatera Utara, masalah-masalah tersebut meliputi kesiapan sarana dan prasarana, kompetensi guru, kurikulum, kesadaran masyarakat, serta kebijakan dan regulasi. Pembahasan ini akan diuraikan secara mendalam dalam beberapa subbab, dengan mengintegrasikan pendapat ahli dan temuan dari jurnal terkait.

#### **1. Kesiapan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Tanpa fasilitas yang memadai, proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak akan berjalan optimal. Namun, berdasarkan temuan BPMP Provinsi Sumatera Utara, banyak sekolah di wilayah ini masih mengalami kekurangan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk ABK. Fasilitas seperti ruang sumber inklusi, alat bantu pembelajaran, dan aksesibilitas fisik bagi ABK masih sangat terbatas. Padahal, menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan ABK. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan.

Menurut Heni Mularsih (2019), banyak sekolah inklusif di Indonesia belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas pendukung. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara, di mana banyak sekolah belum

memiliki ruang sumber inklusi yang memadai. Ruang sumber inklusi merupakan ruangan khusus yang digunakan untuk memberikan layanan pembelajaran tambahan bagi ABK, seperti terapi wicara, terapi okupasi, atau bimbingan khusus. Ruang ini sangat penting bagi ABK karena memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Tanpa ruang sumber inklusi, ABK akan kesulitan mengikuti pembelajaran secara efektif, sehingga menghambat perkembangan akademik dan sosial mereka.

Selain itu, masalah aksesibilitas fisik bagi ABK juga masih menjadi kendala besar di banyak sekolah di Sumatera Utara. Banyak sekolah belum dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas, seperti ramp, toilet khusus, atau lift. Padahal, menurut Smith (2015), aksesibilitas fisik merupakan salah satu prinsip dasar dalam pendidikan inklusif. Fasilitas yang ramah disabilitas tidak hanya memudahkan ABK untuk mengakses lingkungan sekolah, tetapi juga menunjukkan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik. Tanpa fasilitas ini, ABK dengan keterbatasan fisik akan kesulitan bergerak di lingkungan sekolah, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya.

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya berdampak pada ABK, tetapi juga pada guru dan tenaga pendidik. Guru akan kesulitan memberikan layanan pembelajaran yang optimal jika fasilitas pendukung tidak tersedia. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu bekerja sama untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna membangun dan melengkapi fasilitas pendukung di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, upaya mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas akan sulit tercapai.

## **2. Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidik**

Guru memegang peran sentral dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan individu setiap peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun, berdasarkan temuan BPMP Provinsi Sumatera Utara, banyak guru di wilayah ini belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola kelas inklusif. Kurangnya pemahaman tentang karakteristik ABK dan teknik mengajar yang adaptif menjadi tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusif. Padahal, guru yang

kompeten dalam pendidikan inklusif adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua siswa.

Menurut Smith (2015), guru perlu dibekali dengan keterampilan khusus untuk menangani ABK, termasuk kemampuan mengidentifikasi kebutuhan belajar, merancang pembelajaran yang adaptif, dan mengelola kelas inklusif. Guru harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu ABK, sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Namun, banyak guru di Sumatera Utara belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam hal ini. BPMP Provinsi Sumatera Utara mencatat bahwa hanya sedikit guru yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang pendidikan inklusif. Padahal, pelatihan dan pembinaan bagi guru merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif. Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi guru berdampak pada rendahnya kemampuan mereka dalam menangani ABK. Banyak guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, yang kurang efektif bagi ABK. Padahal, ABK membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kreatif. Misalnya, ABK dengan gangguan autisme mungkin memerlukan metode pembelajaran visual, sementara ABK dengan gangguan pendengaran membutuhkan alat bantu dengar atau bahasa isyarat. Tanpa pemahaman yang memadai tentang karakteristik ABK, guru akan kesulitan memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, kurangnya tenaga pendamping khusus (shadow teacher) juga menjadi masalah serius dalam implementasi pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Tenaga pendamping khusus berperan membantu ABK dalam proses pembelajaran, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian lebih. Mereka bertugas memastikan bahwa ABK dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, baik di kelas reguler maupun di ruang sumber inklusi. Namun, ketersediaan tenaga pendamping khusus di Sumatera Utara masih sangat terbatas. Menurut K. Sri Kusuma Wardani dkk., tenaga pendamping khusus sangat diperlukan untuk memastikan bahwa ABK dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Mereka tidak hanya membantu ABK dalam memahami materi pelajaran, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan sosial. Misalnya, ABK dengan gangguan emosional mungkin membutuhkan pendampingan khusus untuk mengelola emosi mereka selama proses pembelajaran. Tanpa tenaga pendamping khusus, guru kelas reguler akan kesulitan memberikan perhatian yang cukup kepada ABK, terutama di kelas dengan jumlah siswa yang banyak.

Kurangnya tenaga pendamping khusus juga berdampak pada beban kerja guru. Guru kelas reguler yang tidak memiliki latar belakang khusus dalam pendidikan inklusif seringkali merasa kewalahan ketika harus menangani ABK. Mereka tidak hanya harus mengajar siswa

reguler, tetapi juga harus memberikan perhatian ekstra kepada ABK. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pembelajaran bagi semua siswa, baik ABK maupun siswa reguler. Oleh karena itu, peningkatan jumlah tenaga pendamping khusus harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu menyediakan pelatihan dan pembinaan yang memadai bagi guru dan tenaga pendidik. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang karakteristik ABK, teknik mengajar yang adaptif, dan strategi pengelolaan kelas inklusif. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan rekrutmen dan pelatihan tenaga pendamping khusus. Dengan adanya tenaga pendamping khusus yang kompeten, guru kelas reguler dapat lebih fokus pada proses pembelajaran, sementara ABK mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Selain itu, kolaborasi antara guru, tenaga pendamping khusus, dan orang tua juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Orang tua ABK dapat memberikan informasi tentang kebutuhan dan karakteristik anak mereka, sehingga guru dan tenaga pendamping khusus dapat merancang pembelajaran yang sesuai. Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, proses pembelajaran inklusif dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi ABK. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik, serta ketersediaan tenaga pendamping khusus, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Tanpa dukungan yang memadai dari guru dan tenaga pendidik, upaya mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kompetensi dan ketersediaan tenaga pendidik dalam pendidikan inklusif.

### **3. Kurikulum dan Pembelajaran**

Kurikulum yang digunakan di banyak sekolah inklusif di Sumatera Utara belum sepenuhnya terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK). Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, kurikulum pendidikan inklusif harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Hal ini berarti bahwa kurikulum tidak boleh bersifat satu untuk semua, melainkan harus fleksibel dan dapat dimodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individu ABK. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah masih menggunakan kurikulum yang sama untuk semua siswa, termasuk ABK. Hal ini menyebabkan ABK kesulitan mengikuti pembelajaran yang dirancang untuk siswa pada umumnya, sehingga menghambat perkembangan akademik dan sosial mereka.

Menurut K. Sri Kusuma Wardani dkk., kurikulum pendidikan inklusif perlu dimodifikasi melalui penyusunan program pembelajaran individual (PPI) untuk ABK. PPI merupakan rencana pembelajaran yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing ABK. Misalnya, ABK dengan gangguan intelektual mungkin membutuhkan materi pembelajaran yang lebih sederhana dan disampaikan dengan metode yang lebih visual, sementara ABK dengan gangguan fisik mungkin membutuhkan alat bantu khusus untuk mengikuti pembelajaran. Namun, implementasi PPI masih sangat terbatas di Sumatera Utara karena kurangnya pemahaman dan sumber daya yang memadai. Kurangnya pemahaman tentang PPI menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kurikulum inklusif. Banyak guru belum memahami bagaimana cara menyusun dan menerapkan PPI yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Padahal, PPI merupakan alat penting untuk memastikan bahwa ABK mendapatkan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Tanpa PPI, ABK akan kesulitan mengikuti pembelajaran yang dirancang untuk siswa pada umumnya, sehingga menghambat perkembangan mereka.

Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan juga belum sepenuhnya adaptif. Menurut Farah dkk. (2022), pembelajaran inklusif harus mengedepankan pendekatan yang fleksibel dan kreatif, sehingga ABK dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya, ABK dengan gangguan autisme mungkin membutuhkan metode pembelajaran yang lebih visual dan terstruktur, sementara ABK dengan gangguan pendengaran membutuhkan penggunaan bahasa isyarat atau alat bantu dengar. Namun, banyak guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, yang kurang efektif bagi ABK.

Metode pembelajaran konvensional, seperti ceramah dan penugasan tertulis, seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan ABK. ABK membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan melibatkan berbagai indera. Misalnya, penggunaan media visual, permainan edukatif, atau kegiatan praktik dapat membantu ABK memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Namun, banyak guru belum terlatih untuk menggunakan metode pembelajaran yang adaptif, sehingga ABK seringkali tertinggal dalam proses pembelajaran. Kurangnya sumber daya dan dukungan juga menjadi kendala dalam implementasi kurikulum dan pembelajaran inklusif. Banyak sekolah di Sumatera Utara belum memiliki alat bantu pembelajaran yang memadai, seperti media visual, alat peraga, atau teknologi pendukung. Padahal, alat bantu pembelajaran sangat penting untuk membantu ABK memahami materi pembelajaran. Selain itu, kurangnya tenaga pendamping khusus juga membuat guru kesulitan memberikan perhatian yang cukup kepada ABK, terutama di kelas dengan jumlah siswa yang banyak.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu memberikan pelatihan dan pembinaan bagi guru tentang cara menyusun dan menerapkan PPI. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang karakteristik ABK, teknik penyusunan PPI, dan metode pembelajaran yang adaptif. Selain itu, sekolah juga perlu dilengkapi dengan alat bantu pembelajaran yang memadai, seperti media visual, alat peraga, dan teknologi pendukung. Dengan dukungan yang memadai, guru dapat merancang dan menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran inklusif merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Kurikulum yang terdiferensiasi dan metode pembelajaran yang adaptif akan membantu ABK mengikuti pembelajaran dengan lebih baik, sehingga mereka dapat meraih potensi terbaiknya. Tanpa kurikulum dan pembelajaran yang sesuai, upaya mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran inklusif.

#### **4. Kesadaran dan Dukungan Masyarakat**

Kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan inklusif merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun, di Sumatera Utara, kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan inklusif masih tergolong rendah. Menurut Martona (2013), pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana ABK dapat diterima dan didukung untuk berkembang. Tanpa dukungan dari masyarakat, upaya mewujudkan pendidikan inklusif akan menghadapi banyak kendala.

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat adalah masih adanya stigma negatif terhadap ABK. Banyak masyarakat di Sumatera Utara masih memandang ABK sebagai individu yang tidak mampu berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat. Stigma ini seringkali membuat ABK dan keluarga mereka merasa terisolasi, sehingga menghambat partisipasi ABK dalam pendidikan inklusif. Padahal, ABK memiliki potensi yang dapat dikembangkan jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Stigma negatif ini juga seringkali membuat keluarga ABK enggan untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah inklusif. Mereka khawatir bahwa anak mereka akan mengalami diskriminasi atau tidak diterima dengan baik oleh lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif masih sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu memahami

bahwa pendidikan inklusif bukan hanya memberikan kesempatan belajar bagi ABK, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua anak.

BPMP Provinsi Sumatera Utara mencatat bahwa sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif masih sangat terbatas. Padahal, sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat. Menurut Farah dkk. (2022), pendidikan inklusif dapat berhasil jika ada dukungan dari semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sosialisasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami bahwa pendidikan inklusif adalah hak setiap anak, termasuk ABK. Selain itu, sosialisasi juga dapat membantu menghilangkan stigma negatif terhadap ABK. Masyarakat perlu memahami bahwa ABK memiliki potensi yang dapat dikembangkan jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Misalnya, ABK dengan gangguan fisik mungkin memiliki bakat dalam bidang seni atau teknologi, sementara ABK dengan gangguan intelektual mungkin memiliki kemampuan sosial yang baik. Dengan memahami potensi ini, masyarakat dapat lebih terbuka dan mendukung partisipasi ABK dalam pendidikan inklusif.

Peran keluarga juga sangat penting dalam mendukung pendidikan inklusif. Keluarga adalah lingkungan pertama yang mengenalkan ABK pada dunia luar. Jika keluarga memiliki pemahaman yang baik tentang pendidikan inklusif, mereka akan lebih termotivasi untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah inklusif dan mendukung proses pembelajaran mereka. Namun, banyak keluarga di Sumatera Utara masih belum memahami pentingnya pendidikan inklusif bagi perkembangan ABK. Untuk meningkatkan kesadaran keluarga, pemerintah dan stakeholder terkait perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan dengan orang tua, seminar, atau kampanye media. Selain itu, sekolah juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada orang tua tentang manfaat pendidikan inklusif bagi ABK. Dengan dukungan dari keluarga, ABK akan lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan mengembangkan potensi mereka.

Selain keluarga, dukungan dari masyarakat sekitar juga sangat penting. Masyarakat dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi ABK. Misalnya, tetangga atau komunitas dapat membantu memastikan bahwa ABK merasa diterima dan didukung dalam lingkungan mereka. Dukungan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial dan emosional ABK. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan inklusif. Pemerintah dapat melakukan kampanye nasional atau regional untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya pendidikan inklusif. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan

lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi yang fokus pada isu disabilitas untuk melakukan sosialisasi yang lebih efektif.

Selain sosialisasi, pemerintah juga perlu menyediakan program pelatihan bagi masyarakat tentang cara mendukung ABK. Misalnya, masyarakat dapat dilatih untuk memahami karakteristik ABK dan cara berinteraksi dengan mereka. Pelatihan ini dapat membantu masyarakat lebih terbuka dan mendukung partisipasi ABK dalam berbagai kegiatan, termasuk pendidikan inklusif. Dengan meningkatnya kesadaran dan dukungan masyarakat, upaya mewujudkan pendidikan inklusif akan lebih mudah tercapai. Masyarakat yang memahami pentingnya pendidikan inklusif akan lebih terbuka dan mendukung partisipasi ABK dalam berbagai kegiatan. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi ABK, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan dukungan masyarakat harus menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Tanpa dukungan dari masyarakat, upaya ini akan sulit tercapai. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, pendidikan inklusif dapat menjadi solusi untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk ABK, untuk meraih potensi terbaik mereka.

## **5. Kebijakan dan Regulasi**

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi tentang pendidikan inklusif, implementasinya di tingkat daerah masih belum optimal. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif, termasuk fasilitas dan tenaga pendidik yang kompeten. Namun, temuan dari BPMP Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa banyak sekolah di wilayah ini masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan. Salah satu masalah utama dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Heni Mularsih (2019), perlu ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan dan regulasi tentang pendidikan inklusif tidak akan efektif. Misalnya, alokasi anggaran untuk pendidikan inklusif seringkali tidak sampai ke sekolah-sekolah yang membutuhkan, atau program pelatihan guru tidak dilaksanakan secara merata di semua daerah.

Kurangnya koordinasi ini juga berdampak pada kesenjangan kualitas pendidikan inklusif antar daerah. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, sementara daerah lain masih kesulitan memenuhi standar minimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat perlu lebih aktif dalam memantau dan mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi dapat direkomendasikan. Peningkatan sarana dan prasarana melalui alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah daerah. Fasilitas seperti ruang sumber inklusi, alat bantu pembelajaran, dan aksesibilitas fisik bagi ABK harus menjadi prioritas. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, proses pembelajaran inklusif tidak akan berjalan optimal.

Pelatihan dan pembinaan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani ABK. Guru perlu dibekali dengan keterampilan khusus, seperti kemampuan mengidentifikasi kebutuhan belajar, merancang pembelajaran yang adaptif, dan mengelola kelas inklusif. Pelatihan ini harus dilakukan secara berkala dan melibatkan semua guru yang terlibat dalam pendidikan inklusif.

Pengembangan kurikulum yang terdiferensiasi melalui modifikasi kurikulum dan penyusunan program pembelajaran individual (PPI) untuk ABK. Kurikulum yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan ABK akan membantu mereka mengikuti pembelajaran dengan lebih baik. Implementasi PPI juga perlu didukung dengan pelatihan bagi guru tentang cara menyusun dan menerapkannya.

Sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif. Masyarakat perlu memahami bahwa pendidikan inklusif adalah hak setiap anak, termasuk ABK. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, atau kegiatan komunitas. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, dukungan terhadap pendidikan inklusif juga akan semakin kuat.

Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan dilaksanakan secara merata di semua daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan di wilayah mereka, serta melaporkannya kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Seperti yang diungkapkan oleh Smith (2015), pendidikan inklusif membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi ABK. Tanpa dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan tenaga pendidik, upaya

mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas akan sulit tercapai. Oleh karena itu, semua pihak perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi tentang pendidikan inklusif dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian, peningkatan kualitas implementasi kebijakan dan regulasi pendidikan inklusif merupakan langkah penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Sumatera Utara. Tanpa koordinasi dan dukungan yang memadai, upaya ini akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan regulasi tentang pendidikan inklusif dilaksanakan secara efektif dan merata.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Implementasi pendidikan inklusif di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, rendahnya kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus (ABK), serta kurikulum yang belum sepenuhnya terdiferensiasi sesuai kebutuhan ABK. Selain itu, kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan inklusif masih rendah, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan inklusif juga belum optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan sarana prasarana, pelatihan dan pembinaan bagi guru, pengembangan kurikulum yang adaptif, serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan pendidikan inklusif dilaksanakan secara efektif. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan tenaga pendidik, pendidikan inklusif dapat diwujudkan sebagai lingkungan yang ramah dan mendukung bagi ABK, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih potensi terbaiknya.

### **Saran**

Implementasi pendidikan inklusif di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, rendahnya kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus (ABK), serta kurikulum yang belum sepenuhnya terdiferensiasi sesuai kebutuhan ABK. Selain itu, kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan inklusif masih rendah, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan inklusif juga belum optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan sarana prasarana, pelatihan dan pembinaan bagi guru, pengembangan kurikulum yang adaptif, serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu,

penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan pendidikan inklusif dilaksanakan secara efektif. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan tenaga pendidik, pendidikan inklusif dapat diwujudkan sebagai lingkungan yang ramah dan mendukung bagi ABK, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih potensi terbaiknya.

## DAFTAR REFERENSI

- BPMP Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Identifikasi kapasitas satuan pendidikan untuk layanan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus*. <https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/bpmp-provinsi-sumatera-utara-laksanakan-identifikasi-kapasitas-satuan-pendidikan-untuk-layanan-inklusif-bagi-anak-berkebutuhan-khusus/>
- Hanifah, D. S., Haer, A. B., Widuri, S., & Santoso, M. B. (2021). Tantangan anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam menjalani pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 473–483.
- Hanifah, D. S., Haer, A. B., Widuri, S., & Santoso, M. B. (2022). Tantangan anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam menjalani pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37833>
- Moloeng, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Mukti, H., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Analisis pendidikan inklusif: Kendala dan solusi dalam implementasinya. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 761–777.
- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan istimewa.
- Riennova, R., Halidjah, S., & Asrori, H. M. (n.d.). Tantangan dan peluang dalam implementasi pendidikan inklusif di SDN 24 Kecamatan Pontianak Kota. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 1(1), 866–879.
- Sri Kusuma Wardani, K., dkk. (2021). *Pelaksanaan program pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.